

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, S. H. 2023. *Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anna Yulianti, S. H. 2022. *Urgensi Digitalisasi Sistem Pendaftaran Tanah*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Arie Sukanti Hutagalung, dkk, 2012, *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*, Denpasar: Pustaka Larasan.
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, 2017, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: PT. Alumni.
- Fajar. Mukti, Achmad Yulianto, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, M. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: Bandar Maju.
- Harsono, Boedi, 2002, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djambatan.
- , 2003, *Hukum agrarian Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Djambatan, Jakarta.
- Is, Muhamad Sadi, Hayatuddin, K, dan Suharyono, 2022, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Kansil, C. S., 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahmud Marzuki, Petter, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, M. S., & Pitlo, A. 1993. *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Narwadan, T. N. A., Lubis, A. F., dan Hakim, A., 2025, *Teori Hukum Positif (Teori Komprehensif dan Perkembangannya)*, Kota Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

- Nugroho, Sigit, S, Tohari, Mohamad & Rahardjo, Mudji, 2017, *Hukum Agraria Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam.
- Philipus, M. H. 1987. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. *Bina Ilmu*, Surabaya, 25, h2.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1979, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur Bandung.
- , 1976, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur Bandung.
- Pugung, S. 2021. *Perihal tanah dan hukum jual belinya serta tanggung jawab PPAT terhadap akta yang mengandung cacat perspektif negara hukum*. Deepublish.
- Rahardjo, S. 2010. *Sosiologi hukum: esai-esai terpilih*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahman, Sufirman & Abbas, Ilham, 2023, *Hukum Dalam Jual Beli Tanah*, Aceh: CV. Sefa Media Utama.
- Sahnan. 2016. *Hukum agraria Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Santoso, Urip, 2009, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana
- Sihombing, I. D. R., & SH, M. 2022. *Cacat Administrasi: Pembatalan Sertifikat Tanah oleh BPN Tanpa Putusan Pengadilan*. Jakarta: Prenada Media.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suratman & Dillah, H, Philips, 2014, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara Dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: AlfaBeta.
- Syamsudin, M, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Urip Santoso, S. H. 2015. *Perolehan hak atas tanah*. Jakarta: Prenada Media.
- , 2017. *Pejabat pembuat akta tanah: Perspektif regulasi, wewenang, dan sifat akta*. Jakarta: Prenada Media.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Tesis/Skripsi/Jurnal

- Akbar, M. F., Rochman, N. F., Wirayuda, R. S., & Rajib, R. K. (2025). Analisis Hukum Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Online Akibat Ketidaksiesuaian Barang. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), 9919-9927. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/5462/5564>
- Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V. (2024). Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(6).<https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPMWidina/article/view/986/1120>
- Anindhita, A. B., Patittingi, F., & Al Rossi, C. (2021). Perbandingan sistem publikasi positif dan negatif pendaftaran tanah: Perspektif kepastian hukum. *Amanna Gappa*, 106-113.
- Aprilia, A. D., & Supriyo, A. (2022). Jual Beli Tanah Yang Bersertifikat Dijamin Hutang Menurut UU No. 5 Tahun 1960. *Madani Legal Review*, 6(2), 16-33. <https://doi.org/10.31850/malrev.v6i2.1572>
- Budi, G. S. (2025). Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 139-148. <https://doi.org/10.62379/wnaj8r67>
- Dewandaru, P. A., Hastuti, N. T., & Wisnaeni, F. (2020). Penyelesaian sengketa tanah terhadap sertifikat ganda di badan pertanahan nasional. *Notarius*, 13(1), 154-169. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29170>
- Dianita, A. C., & Jabbar, A. (2025). A Efektivitas Sertifikat Hak atas Tanah sebagai Alat Bukti Utama dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. *Veritas Judicata: Jurnal Kajian Hukum untuk Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan*, 1(1), 1-10. <https://journalhukumunika.com/jhum/article/view/3/10>
- Fahrani, A., Djaja, B., & Sudirman, M. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Atas Penerbitan Sertifikat Ganda. *Unes Law Review*, 6(1), 3507-3515. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1122>

- Firman, H., & Gunawan, G. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah yang Dilakukan dengan Itikad Baik. *Unes Law Review*, 6(2), 6694-6701. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1528>
- Fitriani, L., Pulungan, M. S., & Sadjarwo, I. W. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Dalam Penerbitan Sertipikat Tanah Ganda Pada Satu Bidang Tanah. *Unes Law Review*, 4(1), 48-63. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1.209>
- Haniva, I. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah Sertifikat Ganda. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 743-756. <https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3334>
- Hulu, K. I. (2021). Kekuatan alat bukti sertifikat hak milik atas tanah dalam bukti kepemilikan hak. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 27-31. <https://www.neliti.com/publications/341571/kekuatan-alat-bukti-sertifikat-hak-milik-atas-tanah-dalam-bukti-kepemilikan-hak#cite>
- Kusnanto, (2019), “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemilih Hak Atas Tanah Dalam Hal Terdapat Sertipikat Ganda*”. Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal.
- Pattinasarany, Y. (2022). Keabsahan Surat Edaran Yang Muatan Materinya Bersifat Pengaturan Dan Sanksi. *Jurnal Saniri*, 3(1), 27-36. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/saniri/article/view/1224>
- Prameswari, K. K. (2025). *Tanggung Jawab Notaris/Ppat Dalam Menjamin Kepastian Hukum Terhadap Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah Oleh Developer Kepada Pembeli* (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Putri, Annesa., (2016), “*Akibat Hukum Terhadap Sertipikat Ganda Yang Dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional (Studi Pada BPN Kota Palembang)*”. Skripsi, Universitas Sriwijaya.
- Rajab, R. A., Turisno, B. E., & Lumbanraja, A. D. (2020). Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah. *Notarius*, 13(2), 642-654. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31085>

- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1), 31-40. <https://doi.org/10.55357/sosek.v2i1.119>
- Rasyid, M. R., & Winanti, A. (2023). Perlindungan Hukum Terkait Pemegang Hak Milik Atas Tanah Dalam Kepemilikan Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3061 K/Pdt/2022). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(4), 2271-2281. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2366>
- Rizki, K., Sundary, R. I., Sidik, J., Jamilah, L., & Yunitawati, Y. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dengan Terbitnya Sertifikat Ganda Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. *Universitas Islam Bandung*. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6763>
- Setyadji, A. W., Warka, M., & Hufon, H. (2020). Jaminan Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Menurut Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam Sengketa Pertanahan. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 5(1), 1-17. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v5i1.916>
- Susanto, Aman, 2017, *Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Di Ptun Pasca Disahkannya UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Tesis: UII, Yogyakarta.
- Wagiu, S. D., Kalalo, M. E., & Koloay, R. N. (2023). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Yang Diterbitkan Oleh Badan Pertanahan Nasional. *Lex Administratum*, 11(4). <https://doi.org/10.58222/juruh.v3i1.771>
- Wicaksono, S., Bagas, B., & Reyhansyah, A. (2024). Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan di Indonesia: Kajian Politik Hukum: *Resolution of Land Disputes and Conflicts in Indonesia: A Study of Legal Politics*. *Dialogia Iuridica*, 16(1), 068-095. <https://doi.org/10.28932/di.v16i1.9993>
- Zamil, Y. S., Eprilia, F. F., Firdaus, H., Maharso, T., & Rizal, N. (2024). Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia: Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1305-1322. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10239>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

D. Internet

Hukum Online, "*Tentang Sertifikat Hak Atas Tanah dan Sertifikat Hak Tanggungan*" diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-sertifikat-hak-atas-tanah-dan-sertifikat-hak-tanggungan-lt518b9e0d8a7a8/>
Putusan Pengadilan Tinggi, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>